

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai penerapan sistem *presidential threshold* terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan ambang batas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan *threshold* dimasa yang akan datang. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan ambang batas dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagaimana pengaturan *threshold* di masa yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan metode pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus serta pendekatan sejarah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melalui seleksi data, klasifikasi data dan Sistematika data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *presidential threshold* tidak relevan dengan prinsip kedaulatan rakyat, karena penerapan *presidential threshold* tidak memberikan penghormatan terhadap partai politik yang memperoleh suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Salah satu prinsip kedaulatan rakyat tersebut adalah harus adanya pengakuan terhadap kedaulatan suara mayoritas serta memberikan penghormatan terhadap suara minoritas dengan cara memberikan kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Kata Kunci: analisis, pemilihan Umum, *presidential threshold*

ABSTRACT

This study discusses the application of the presidential threshold system to the general election of the President and Vice President in Indonesia. The purpose of this study is to find out and analyze the setting of thresholds setting in the general election of the President and Vice President in Indonesia, and to find out and analyze how to set thresholds in the future. The main problem of this research is how to set the threshold in the general election of President and Vice President in Indonesia based on statutory regulations. How will the electoral threshold be set in the future. To answer these problems, the author uses the juridical-normative research method, using the conceptual approach, statutory approach, case approach and historical approach. The legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. And the method of processing legal materials is carried out through data selection, data classification and data systematics. The results of this study indicate that the application of the presidential threshold is irrelevant to the principle of popular sovereignty, because the application of the presidential threshold does not pay respect to political parties that obtain minority votes by providing equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice. One of the principles of popular sovereignty is that there must be recognition of the sovereignty of the majority vote and respect for minority voices by providing equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice.

Keywords: analysis, general election, presidential threshold